

PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA

Syaifuddin Iskandar¹, Sulkifli^{2*}, Heri Kurniawansyah³

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar

Penulis Korespondensi: sulkifli09@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: November 2023</i> <i>Revised: Desember 2023</i> <i>Published: 30 Desember 2023</i>	
Keywords <i>Akuntabilitas;</i> <i>Polisi Pamong Praja;</i> <i>Tugas dan Fungsi;</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumbawa, Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan bagaimana upaya satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan wawancara dan observasi. Alat analisis data yaitu dengan menggunakan teori Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sumbawa sudah menjalankan prinsip akuntabilitas dalam mengelola organisasi dan menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya meskipun belum sempurna serta masih perlu peningkatan. Adapun Faktor pendukungnya adalah semua pegawai konsisten dalam menjalankan tupoksinya, kemampuan SDM yang semakin baik, sudah ada sarana dan prasarana serta dari segi anggaran sudah ada namun masih belum memadai sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya sarana dan prasarana dan SDM serta tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Untuk menghadapi semua kendala yang ada Satuan Polisi Pamong Praja tetap melakukan perbaikan baik dari sisi sarana dan prasarana, SDM serta dari segi anggaran ambil suatu kebijakan ataupun suatu keputusan dilakukan dengan voting.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi program pembangunan yang dilaksanakan dan dijalankan oleh pemerintah, dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang baik dan memadai, dukungan aparatur pemerintah sendiri serta masyarakat secara umum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparat pemerintah juga bukan hanya harus dilihat dari segi jumlah personil atau kuantitas, tetapi yang penting menjadi salah satu tolok ukur keberhasilannya adalah kualitas sumberdaya manusia dari aparat pemerintah itu sendiri. Sumberdaya manusia aparatur merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah khususnya di daerah tidak bisa lepas dari dukungan lembaga-lembaga, dinas atau badan dan organisasi pendukung lainnya baik itu organisasi internal yang langsung berada dan masih berada di bawah naungan struktur organisasi pemerintah sendiri maupun organisasi eksternal dan kemasyarakatan lainnya.

Menurut Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sumbawa disebutkan dalam Pasal 4 (1) bahwa Kepala Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Peran dan fungsi alat kelengkapan keamanan dan ketertiban negara merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah untuk mendorong agar semua program pemerintah bisa berjalan dengan baik dan lancar, agar prinsip-prinsip keterbukaan dan tanggungjawab lembaga-lembaga pemerintah seperti Satuan Polisi Pamong Praja ini bisa diwujudkan dan berjalan dengan baik dan lancar serta praktek-praktek korupsi, kolusi maupun nepotisme bisa ditekan dan dicegah terutama di level lokal yaitu pada kantor Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji dan dianalisis.

Kehadiran Satpol PP di dalam struktur besar organisasi pemerintah daerah menjadi salah satu tolok ukur yang digunakan untuk melihat indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Karena Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aktor yang terlibat langsung dalam mendorong agar warga sadar akan pentingnya menjaga sikap kebersamaan, toleransi, menghindari konflik antar sesama, pentingnya memahami dengan baik ajaran agama bagi pembangunan kehidupan bermasyarakat. Studi ini berdasarkan observasi awal yang kami lakukan memang masih jarang, sehingga saya tertarik untuk melihat secara langsung bagaimana bentuk Peran dan Fungsi yang dimainkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan adanya Program-Program yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Sumbawa.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masalah Sumberdaya Manusia masih dianggap rendah, begitu juga kinerja aparatur yang bertugas didalamnya juga masih dianggap perlu ditingkatkan. Selain itu, yang menarik juga adalah berkaitan dengan masalah persepsi publik terhadap keberadaan Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat dan yang tidak luput juga adalah berkaitan dengan efektifitas kerja dari pegawai yang ada dalam organisasi Satpol PP itu sendiri.

Banyak masukan-masukan dari masyarakat yang tidak sedikit menyinggung mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja ini dan memang akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus pencurian, penggrebakan, perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas dan lainlain yang kadang-kadang sering disangkutkan dengan keberadaan instansi Satpol PP dalam menjalankan program-programnya.

Berbagai masukan dan kritikan yang muncul terkait dengan manajemen pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, berdasarkan hasil observasi awal yang telah saya dilakukan, ternyata aspek pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari implementasi semua tugas organisasi menjadi salah satu aspek penting yang menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam lagi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi suatu objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain (Sugiyono, 2003:11). Sebagai penelitian deskriptif, penelitian ini berisikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dimana dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi atau mengambil lokus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan ; Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sumbawa, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Kabid Sumberdaya Aparatur dan Kabid Perlindungan Masyarakat pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sumbawa, Anggota Satpol PP dan Warga Masyarakat yang bisa mendukung serta memberikan informasi lengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hal tersebut dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi serta data yang valid dan akurat berkaitan dengan objek penelitian. Analisa Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Pemeriksaan keabsahan data untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik Trigulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, semua organisasi pemerintah, swasta dan profesional untuk mendukung agar organisasinya mampu bekerja dan bergerak cepat menjadi organisasi maju dan modern selalu mengedepankan penerapan prinsip akuntabilitas dalam mengelola organisasinya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, salah satu ciri dari organisasi modern adalah organisasi yang tetap mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern salah satunya adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari Badan Hukum atau Pimpinan suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban tersebut (Halim:2014:83). Sebagai organisasi pemerintah, Satpol PP Sumbawa, dituntut untuk mampu bertanggungjawab dengan beragam jenis akuntabilitas itu sendiri. Selain harus mampu bertanggungjawab dan jujur dalam hal menegakkan hukum dan kejujuran juga harus mampu bertanggungjawab secara manajerial, harus mampu bertanggungjawab atau memiliki akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan dan Finansial. Sementara prinsip akuntabilitas itu berkaitan dengan komitmen baik dari pimpinan dan staf

untuk melakukan pengelolaan organisasi dan berkaitan dengan sistem yang menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dan hasil analisis data yang diperoleh di lapangan terkait dengan penerapan prinsip akuntabilitas oleh Dinas Satpol PP Kabupaten Sumbawa dapat dilihat dari dua aspek yang saling mendukung satu sama lain: Pertama, Aspek komitmen pimpinan dan staf terhadap pengelolaan organisasi. Sebagai organisasi pemerintah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dengan banyak fungsi, tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, menuntut mereka agar mampu mengelola organisasi dengan baik dan profesional. Pimpinan memiliki tanggungjawab besar dalam mendorong agar semua bagian atau unit yang ada dalam struktur organisasi ini bisa bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada. Sebaliknya pegawai staf atau bawahan juga dituntut untuk wajib menjalankan semua tupoksi organisasi sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang ada. Komitmen pimpinan dan bawahan yang ada di Dinas Satpol PP Sumbawa ini, jika dilihat dari hasil observasi dan wawancara langsung yang peneliti lakukan, bahwa baik pimpinan maupun pegawai yang ada terus berusaha agar prinsip akuntabilitas ini dapat dijalankan dengan seutuhnya secara lancar dan berkesinambungan, bukan saja sekarang tetapi bisa terus menjadi semangat dan nilai lebih dalam melihat Satpol PP oleh organisasi lain maupun oleh masyarakat Sumbawa secara umum.

Memang dalam mengelola organisasi pemerintah seperti Satpol PP memiliki tantangan tersendiri, misalnya berkaitan dengan masalah ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan sumberdaya manusia, kemampuan semua unit yang ada di dalamnya untuk mau dan bisa bekerja sesuai Tupoksi serta ketersediaan anggaran operasional bagi pegawai atau staf yang ada. Sementara itu, kembali merujuk UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di mana Satpol PP diberi peran dan fungsi sebagai pelaksana urusan wajib khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman maupun perlindungan masyarakat. Konsekuensi dari peran dan fungsi yang diberikan tersebut adalah baik pimpinan maupun bawahan harus mampu mengelola organisasi dengan baik, melakukan reformasi dan penataan struktur dengan baik, mengelola sumberdaya manusia maupun keuangan yang ada dengan baik dan profesional serta menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hasil wawancara dengan narasumber maupun dari data-data dokumentasi lapangan, Satpol PP Kabupaten Sumbawa sudah berusaha menerapkan prinsip ini dengan baik dan roda organisasi tetap berjalan dengan lancar. Ini tidak lepas dari kemampuan manajerial dari pimpinan sendiri dan komitmen dari pegawai dan staf untuk tetap menjaga nama baik organisasi dengan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tupoksi yang sudah diatur. Meskipun harus juga diakui kalau penerapan prinsip ini dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tupoksi Organisasi masih perlu perbaikan dan penyempurnaan secara kontinyu tidak bisa langsung jadi.

Kedua, sistem yang menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Suatu organisasi apalagi ini organisasi pemerintah yang melayani kebutuhan dan kepentingan publik, tentu memiliki banyak kebutuhan sekaligus tantangan

sehingga mereka bisa dan dapat menjalankan Tupoksinya dengan baik dan lancar. Secara umum, Satpol PP Kabupaten Sumbawa sudah bekerja sesuai dengan Tupoksi yang diberikan kepadanya. Pada kondisi yang lain, masih ada yang masih dianggap kurang dan perlu perbaikan serta penambahan jumlah aparatur yang bekerja untuk mendukung pelaksanaan program-program Satpol PP Sumbawa itu sendiri.

Prinsip akuntabilitas ditunjukkan dengan pembagian pekerjaan terhadap semua pegawai yang ada sesuai dengan kemampuan dan SDM Aparatur yang dimilikinya. Sudah ada tugas-tugas khusus yang menangani masing-masing bidang sesuai dengan Tupoksi mereka masing-masing. Mereka bekerja sesuai dengan garis komando yang ada pada struktur organisasi Satpol PP itu sendiri. Ketika aparat melakukan penertiban atau operasi gabungan, mereka terlebih dahulu dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan tentang batas tugas yang diberikan khusus kepada aparat Satpol PP tidak dengan serta merta mengambil peran dan fungsi lembaga atau organisasi lain semisal kepolisian. Semua peran dan fungsi di atas dalam pengamatan peneliti, secara umum dalam pelaksanaannya sudah menerapkan prinsip pembagian tugas dengan baik dan dijalankan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki organisasi itu sendiri. Semua kegiatan yang sudah dijalankan tetap dipertanggungjawabkan baik lewat laporan pertanggungjawaban tertulis dan non tertulis seperti laporan langsung ke atasan atau pimpinan. Secara umum penerapan prinsip akuntabilitas dalam rangka menjalankan peran dan fungsinya, Satpol PP Kabupaten Sumbawa sudah melakukan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Meskipun masih perlun perbaikan dan peningkatan dalam hal mutu atau kualitas peran dan fungsinya itu sendiri.

Faktor Pendukung dan Penghambat Bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Rangka Menerapkan Prinsip Akuntabilitas

Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang mendukung atau akan mempengaruhi suatu bentuk pekerjaan atau program atau kebijakan serta berhasil atau tidak untuk dilaksanakan. Setiap organisasi pada umumnya pasti dihadapkan pada situasi antara berhasil atau tidak suatu pekerjaan yang akan dibuat atau dilakukannya. Dua masalah tersebut adalah antara yang mendukung dan menghambatnya. Begitu juga dengan keinginan Kantor Satpol PP Sumbawa dalam upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, ternyata selain ada faktor-faktor yang 61 mendukung berjalannya peran dan fungsi organisasi agar bisa berjalan dengan baik dan lancar, ternyata juga ada faktor yang menjadi penghambat atau hambatan-hambatan yang dirasa cukup mengganggu dinamika organisasi yang mengakibatkan kadang-kadang peran dan fungsi organisasi ikut terganggu. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat dua aspek yang berbeda dari ini yaitu faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat.

Adapun faktor-faktor pendukung Satpol PP dalam menerapkan Prinsip Akuntabilitas adalah sebagai berikut: *Pertama*, semua pegawai umumnya tetap konsisten menjalankan peran sesuai Tupoksi yang sudah diberikan. Kondisi di lapangan membuktikan bahwa sebagai aparatur negara

dituntut untuk tetap menjalankan tugas dengan baik dan benar, apapun program yang akan dibuat dan dikerjakan harus sesuai dengan aturan yang ada, tidak boleh pegawai atau staf bertindak semena-mena terhadap masyarakat atau tetap melayani kepentingan masyarakat yang datang ke Kantor Pol PP dengan baik. Secara umum, pegawai-pegawai yang bekerja dan bertugas di Satpol PP Sumbawa tetap masuk kerja sesuai hari dan jam kerja, tetap melakukan Patroli sesuai jadwal yang ada dan tugas-tugas yang lainnya. *Kedua*, kemampuan sumberdaya manusia organisasi yang semakin baik. Ini bisa dilihat dari indikator tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Pegawai Dinas Satpol PP Sumbawa yang semakin bagus dan semakin berkurangnya jumlah pegawai yang berpendidikan SMA dan semakin banyaknya pegawai yang berpendidikan S1. 3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan administratif dan operasional. Meskipun dalam kondisi yang sebenarnya di lapangan, jumlah kendaraan atau fasilitas lainnya masih dirasa kurang dalam mendukung tugas-tugas operasional pegawai. 4. Tersedianya Anggaran khusus dari APBD untuk biaya Operasional Organisasi meskipun masih belum maksimal. Misalnya pada Tahun 2021 jumlah anggaran dari dana APBD Sumbawa untuk Satpol PP sebanyak Rp.7.834.584.581,00. Dari jumlah anggaran yang tersedia, ternyata belum cukup untuk menunjang dan mendorong agar semua program kerja organisasi bisa berjalan secara optimal. 5. Sistem dan mekanisme kerja serta manajemen pengelolaan organisasi yang semakin baik berdampak kepada kinerja pegawai dan staf yang semakin baik. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa setiap Tahun, Kantor Dinas Satpol PP Sumbawa tetap berusaha untuk melakukan penataan sistem dan mekanisme kerja dengan prinsip keterbukaan dan prinsip akuntabilitas. Dari hasil pengamatan langsung yang penulis lakukan, bahwa Pimpinan pada Dinas Satpol PP berusaha merealisasikan Program yang berhubungan dengan reformasi kelembagaan, peningkatan mutu kepegawaian, perbaikan database pegawai, semua pegawai atau staf harus datang tepat waktu dan harus menjalankan setiap tugas yang diberikan serta harus memberikan alasan yang jelas kalau tidak bisa atau berhalangan. 6. Semakin jelas batas wewenang, tugas, pokok, fungsi dan peran yang diberikan kepada Satpol PP Sumbawa semakin membuat pimpinan dan jajaran dalam organisasi menjadi lebih leluasa untuk mengatur dan mengelola organisasi sesuai dengan prinsip akuntabilitas. 7. Dukungan dari semua bidang yang sudah menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal. Dukungan ini terlihat misalnya ketika ada satu kegiatan yang akan dilakukan aparat Satpol PP dalam rangka penertiban PKL, maka otomatis bagian atau bidang yang berhubungan dengan masalah tersebut melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan terlebih dahulu. Pola komunikasi dan koordinasi yang terbangun antara bidang dan bagian-bagian yang ada pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sumbawa sampai dengan saat riset ini lakukan tetap berjalan dengan prinsip kerjasama yang baik.

Sedangkan faktor penghambat itu sendiri adalah semua faktor yang dapat menghambat atau mempengaruhi tidak berjalannya tugas, fungsi dan peran seseorang, kelompok atau organisasi. 1. Masih kurangnya sarana sehingga sulit untuk melakukan kegiatan. Ini adalah salah satu faktor umum yang masih menghantui perjalanan kerja birokrasi pemerintah. Organisasi pemerintah terkadang identik dengan organisasi yang dijalankan dengan apa adanya, dengan

perlengkapan seadanya, dengan fasilitas yang pokoknya ada. Sementara di sisi lain, tingkat kebutuhan akan berbagai masalah yang dihadapi masih kompleks. Sehingga kompleksnya masalah dan kebutuhan tentu harus dibarengi dengan ketersediaan sarana penunjang yang cukup juga. 2. Masih kurangnya sumberdaya manusia organisasi. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, bahwa untuk kebutuhan personil baik yang bertugas di dalam kantor maupun lapangan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa masih sangat kurang dan masih perlu penambahan yang signifikan, jika dibandingkan dengan 65 luas dan jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa yang harus dilayani. Dampak dari masih kurangnya jumlah personil ini adalah pada program kerja Satpol PP yang ikut menjadi kendala. 3. Sedikitnya anggaran sehingga sedikit kegiatan yang bisa dilakukan. Semua aktivitas atau program-program kerja baik itu yang sifatnya individu maupun organisasi, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana atau anggarannya. Jumlah anggaran yang besar dan memadai akan mempercepat realisasi dari berbagai bentuk program yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan anggaran yang besar dan memadai, maka program-program kerja yang menjadi tujuan utama implementasi visi dan misi organisasi bisa segera direalisasikan dan bentuk-bentuk kelemahan maupun kekurangan bisa segera ditutupi. 4. Sarana dan Prasarana belum mampu mengimbangi beban kerja Satpol PP. Keberadaan sarana dan prasarana yang ada sampai dengan penelitian ini dilakukan secara umum ada tetapi belum mampu mengimbangi beban kerja dari Satpol PP itu sendiri. Misalnya keberadaan Kendaraan Dinas masih pakai yang lama dan juga sering terjadi perbaikan.

KESIMPULAN

Bahwa penerapan prinsip-prinsip Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sumbawa, sudah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terutama yang berhubungan dengan Aspek komitmen pimpinan dan staf terhadap pengelolaan organisasi dan aspek sistem yang menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten. Secara umum sudah dilaksanakan meskipun masih perlu penyempurnaan dan peningkatan kualitas atau mutu dari peran dan fungsi itu sendiri khususnya yang berhubungan dengan aspek akuntabilitasnya.

Adapun faktor-faktor pendukung dalam penerapan prinsip akuntabilitas tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Sumbawa adalah: a. Semua pegawai tetap konsisten menjalankan peran sesuai Tupoksi, b. Kemampuan sumberdaya manusia organisasi yang semakin baik, c. Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan administratif dan operasional, d. Tersedianya Anggaran khusus dari APBD untuk biaya Operasional meski belum maksimal, e. Sistem dan mekanisme kerja serta manajemen pengelolaan organisasi yang semakin baik dan semakin jelas batas wewenang, tugas, pokok, fungsi dan peran yang diberikan kepada Satpol PP Sumbawa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sebagai berikut: a. Masih kurangnya sumberdaya manusia organisasi (personil yang masih sedikit), b. Masih kurangnya sarana sehingga sulit untuk melakukan kegiatan, c. Masih kurangnya anggaran sehingga sedikit kegiatan yang bisa dilakukan, dan. d. Sarana dan Prasarana belum mampu mengimbangi beban kerja Satpol PP dan Kendaraan Dinas masih pakai yang lama dan juga sering terjadi perbaikan.

Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut: a. Program penambahan jumlah Sumberdaya Manusia Aparatur, b. Perbaikan dan Penambahan jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung kegiatan Operasional, dan c. Perbaikan dan peningkatan kualitas manajemen pelayanan mulai dari aparatur, fasilitas, metode dan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan.(2008). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kartono, Kartini.(1994). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta :CV.Rajawali.

Kencana. (1998).*Manajemen Pemerintahan*. Jakarta :PT. Pertja

Richard M Steers, Efektivitas Orgasnisasi, Terjemahan Magdalena Jamin, Jakarta. LPPM Erlangga, 1985

Thoha Miftah.(2012).*Kepemimpinan Dalam Manajemen*: Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.